



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) BPKPAD TAHUN 2024

R

I

S

K

OPERASIONAL



scan me for softcopy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat terselesaikan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan suatu dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dalam penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis. Yaitu pengendalian terhadap risiko-risiko strategis dan pengendalian terhadap risiko-risiko operasional.

Melalui dokumen RTP Operasional ini, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuan Operasional Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dan untuk meningkatkan kapasitas Organisasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien, produktif, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP Operasional ini akan selalu diselaraskan seiring berjalannya waktu dan kegiatan, sehingga masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus karena belum semua risiko yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dapat serta merta diidentifikasi, dianalisis dan disusun kegiatan pengendaliannya. Oleh karena itu diperlukan komitmen untuk selalu melakukan penyempurnaan dan mengimplementasikannya.

Temanggung,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah,



TRI WINARNO, SE.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197310201999031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN YANG DIHARAPKAN	6
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI	6
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN	13
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	15
A. PENETAPAN TUJUAN	15
B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO.....	18
C. HASIL ANALISIS RISIKO.....	24
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN.....	26
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	28
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	31
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN	33
BAB VI PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian	7
Tabel II. 2	Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian <i>Intern</i> <i>Control Environment Evaluation (CEE)</i>	8
Tabel II. 3	Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Pada BPKPAD Kab Temanggung tahun 2023.....	12
Tabel II. 4	Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.....	12
Tabel II. 5	Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian BPKPAD Kab Temanggung ..	13
Tabel III. 1	Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BPKPAD 2024	16
Tabel III. 2	Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD	17
Tabel III. 3	Hasil Identifikasi Risiko Operasional	19
Tabel III. 4	Skala Pengukuran Kemungkinan Risiko	24
Tabel III. 5	Skala Pengukuran Dampak Risiko	24
Tabel III. 6	Hasil analisis risiko pada BPKPAD	25
Tabel III. 7	Hasil dari Analisis risiko Prioritas	25
Tabel III. 8	Uraian pengendalian yang sudah ada di BPKPAD	27
Tabel III. 9	RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian.....	28
Tabel IV. 1	Rancangan Informasi dan Komunikasi	31
Tabel V. 1	Pemantauan Kegiatan Pengendalian <i>Intern</i> yang Dibutuhkan	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju *Good Governance* yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi dan pelaksanaan sistem pengendalian *Intern* yang memadai serta dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian Internal dalam mengelola keuangan negara/daerah. Oleh karena itu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) yang merupakan tindak lanjut/langkah dari UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP).

Berkaitan dengan hal tersebut untuk mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian *Intern* maka BPKPAD Kabupaten Temanggung menyusun Rencana Tindak Pengendalian Operasional sebagai acuan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta untuk menciptakan *good governance* yang sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian *intern* yang dibangun dapat lebih efektif dan efisien, diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional BPKPAD merupakan salah satu bagian dari tahapan pengelolaan risiko yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas program dan kegiatan pada BPKPAD yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja BPKPAD) tahun 2024. Untuk mengelola risiko operasional tersebut, dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang membentuk siklus yaitu:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;

3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan.

Dari hasil penilaian risiko operasional OPD akan tersusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilaksanakan OPD.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi BPKPAD Kabupaten Temanggung
6. Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 700/92 Tahun 2022 tentang Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Melalui rencana tindak pengendalian ini, diharapkan dapat diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan dalam Renstra periode 2024-2026 dapat tercapai.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko operasional ini difokuskan pada perbaikan pengendalian dalam rangka mendukung sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Perubahan BPKPAD tahun 2019-2023

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah secara umum memiliki fungsi strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai misi 3 yaitu: **“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN”**”.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi”**. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah **“Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah yang Transparan dan Akuntabel”**” dengan indikator program :

1. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
2. Persentase dokumen penganggaran tepat waktu
3. Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu
4. Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah
5. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu
6. Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu
7. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
8. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
9. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
10. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah
11. Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu

Rencana tindak pengendalian dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Operasional Tahun 2024 ini difokuskan pada pengendalian dan antisipasi risiko dalam rangka mendukung sasaran-sasaran operasional (program dan kegiatan) organisasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang tertuang dalam Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung tahun 2024. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pengelolaan risiko strategis pada BPKPAD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Dalam PP Nomor 60 tahun 2008 menyebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian *Intern* dalam lingkungan kerjanya, melalui 9 (sembilan) sub unsur antara lain:

- a. penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. perwujudan peran aparat pengawasan *Intern* pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Dalam mengidentifikasi kelemahan lingkungan Pengendalian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE);
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan

2. Penilaian Risiko, yang terdiri :

Penilaian Risiko dilakukan melalui 3 (tahap) kegiatan yang terdiri atas :

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) Persiapan penilaian risiko;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

- b. Identifikasi Risiko Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi, dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
- c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Melakukan validasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian;
 - b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP;
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
- 3. Kegiatan Pengendalian, yang terdiri:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4. Informasi dan Komunikasi

Merupakan pengomunikasian pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait baik eksternal maupun di Internal organisasi sehingga informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.
- 5. Pemantauan, yang terdiri:
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.
 - c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian *Intern*. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian *Intern* dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian *Intern* yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif melalui 9 (sembilan) sub unsur seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya meliputi:

- a. penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. kepemimpinan yang kondusif
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. perwujudan peran aparat pengawasan *Intern* pemerintah yang efektif
- h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan penilaian lingkungan pengendalian melalui langkah-langkah berikut ini :

1. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
Persiapan-persiapan yang dilakukan Antara lain adalah mempersiapkan dokumen-dokumen seperti Laporan Hasil Reviu (LHR) terkait kinerja yang ada pada BPKPAD serta menyiapkan lembar kuisisioner/gform terkait survey lingkungan pengendalian yang akan dilaksanakan beserta kertas kerja penyusunan Dokumen RTP.
2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.
3. Survei Terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survey ini dilakukan melalui kuesioner *control Enviroment Evaluation* (CEE) yang dibagikan dan diisi oleh seluruh pejabat struktural dan staff BPKPAD Kab Temanggung dengan tujuan mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian pada BPKPAD Kab Temanggung dengan kriteria skoring sebagai berikut :

Tabel II. 1
Kriteria Skoring Penilaian Unsur Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan
1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Apabila Modus yang didapatkan dari hasil skoring menunjukkan hasil 3 dan 4 maka “Memadai” dan apabila modus menunjukkan hasil 1 dan 2 maka “Kurang memadai”.

4. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
Berdasarkan kuisisioner *control Enviroment Evaluation* (CEE) yang telah dibagikan kepada PNS BPKPAD. Dari 62 orang PNS BPKAD, 50 orang telah mengisi kuisisioner tersebut dengan hasil sebagai berikut :

Tabel II. 2

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN *INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)*

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUOSIONER CEE																						
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50		
a	b	c																															d																						
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																															3	Memadai																						
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	1	3	4	4	3	3	3	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	2	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	1	2	4	4	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	4	2	1	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	4	1	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	4	2	4	1	3	4	4	3	1	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
B.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																															3	Memadai																						
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	2	3	4	2	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3			
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	2	2	1	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3				
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	3	3	1	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	1	3	2	3	2	4	2	2	3	2	3	4	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	4	3	3	1	2	2	4	3				
C.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																															3	Memadai																						

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														SIMPULAN KUOSIONER CEE																							
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30		R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	R42	R43	R44	R45	R46	R47	R48	R49	R50	Modus		
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	3	4	1	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	1	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	3	4	1	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	1	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	3	4	2	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	2	3	3	3	3	3	4	1	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3			
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	1	3	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4		
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3			
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasi OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	2	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3			
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	3	4	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	1	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3		
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	3	4	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																															3	Memadai																						
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	2	4	2	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	2	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUOSIONER CEE																					
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50	
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	3	3	3	2	4	3	4	3	1	3	3	2	3	3	2	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																															3	Memadai																					
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3			
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	3	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3		
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	2	3	2	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	4	3	3	3	3	2	4	3		
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																															3	Memadai																					
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3		
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	1	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3	2	3	4	3				
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3			
4	Pemda telah mengInternalisasi budaya sadar risiko	4	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	3	4	2	3	4	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	4	4	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	3	3	3	2	3	4	3			

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)																														M o d u s	SIMPULAN KUOSIONER CEE																				
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15	R 16	R 17	R 18	R 19	R 20	R 21	R 22	R 23	R 24	R 25	R 26	R 27	R 28	R 29	R 30			R 31	R 32	R 33	R 34	R 35	R 36	R 37	R 38	R 39	R 40	R 41	R 42	R 43	R 44	R 45	R 46	R 47	R 48	R 49	R 50
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	1	2	3	2	3	2	3	3	4	4	2	2	3	4	2	4	4	3	3	2	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	3
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	4	1	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	2	3	4	2	4	4	2	3	3	3	3	4	2	2	3	3	4	4	1	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	4	3	3	2	1	3	4	3
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																															3	Memadai																				
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	4	2	2	3	4	3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																															3	Memadai																				
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	

Berdasarkan hasil pengisian pada table II.2 penilaian terhadap lingkungan pengendalian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, diperoleh ringkasan hasil sebagai berikut:

Tabel II. 3
Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian Pada BPKPAD Kab Temanggung tahun 2023

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;	Memadai
2	Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;	Memadai
3	Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;	Memadai
4	Terbentuknya struktur organisasi yang sesuai;	Memadai
5	Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;	Memadai
6	Terwujudnya penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat;	Memadai
7	Terwujudnya peran aparat pengawasan <i>Intern</i> ;	Memadai
8	Terwujudnya hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah.	Memadai

Berdasarkan tabel di atas, evaluasi lingkungan pengendalian pada BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum dari 8 (delapan) sub unsur memiliki kondisi yang “Memadai”. Meskipun penilaian lingkungan pengendalian melalui kuisisioner *Control Enviroment Evaluation* (CEE) didapatkan hasil yang “memadai” tetapi penilaian lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen dan dari hasil diskusi *Internal*, terdapat beberapa elemen yang masih kurang memadai antara lain :

Tabel II. 4
Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen

No	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Renstra Perubahan 2019-2023	Kurangnya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah	Komitmen terhadap Kompetensi
2	Rapat <i>Internal</i> seluruh Karyawan BPKPAD	Masih terdapat Pegawai yang belum disiplin waktu dan disiplin dalam berpakaian (atribut)	Penegakan integritas dan nilai etika
3	R/133.LHR/700/00 3/VII/2023	Pohon kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
4	R/062.LHR700/00 3/V/2023	Belum terdapat SOP terkait penghapusan piutang daerah dan pengawasan dan pemeriksaan pajak	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan

No	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
		Belum optimalnya tapping box	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
		Belum optimalnya penagihan tunggakan PBB P2	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
5	R/095.LHR700/003/VI/2023	Terdapat beberapa besaran pada SSH yang disusun belum sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020	Komitmen terhadap Kompetensi
6	R/183.LHR700/003/IX/2023	Perangkat Daerah belum mengumpulkan berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang pengelolaan BMD BPKPAD	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
		Perangkat Daerah belum memperbarui data data kendaraan dinas dan pengusulan penghapusan kendaraan dinas	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
		Terdapat perjanjian sewa menyewa aset pemda yang belum diperbarui	hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Berdasarkan data yang telah dibahas pada point sebelumnya, atas lingkungan pengendalian dengan pendekatan kuisisioner *Control Enviroment Evaluation* (CEE) yang menunjukkan hasil penilaian memadai, namun hasil penilaian *Control Enviroment Evaluation* (CEE) berdasarkan dokumen terdapat hasil penilaian yang kurang memadai. Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi tersebut, dibuat RTP lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

Tabel II. 5

Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian BPKPAD Kab Temanggung

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	Masih terdapat Pegawai yang belum disiplin waktu	Dievaluasi secara berkala dalam apel pagi dan rapat berkala	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
II Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Kurangnya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah	Pengembangan kompetensi melalui pengusulan diklat pegawai/Workshop	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Terdapat beberapa besaran pada SSH yang disusun belum sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020	Melakukan Peninjauan besaran satuan harga pada Draft Peraturan Bupati tentang SSH dan SBU, ASB, dan HSPK Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020	Kepala BPKPAD	Triwulan II dan Triwulan III tahun 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
III Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan				
1	Belum terdapat SOP terkait penghapusan piutang daerah dan pengawasan dan pemeriksaan pajak	Menyusun Perubahan Perbup tentang penghapusan piutang daerah dan menyusun SOP penghapusan piutang daerah serta SOP Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan Pajak	Kepala BPKPAD	Triwulan I tahun 2024
2	Pohon kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Kepala BPKPAD	Triwulan II tahun 2024
IV hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait				
1	Belum optimalnya tapping box	Melaksanakan Pemantauan terkait pemasangan tapping box pada Restoran, hotel dsb yang menjadi obyek Pajak Daerah	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Belum Optimalnya Penagihan Tunggal PBB	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke desa dan kelurahan	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
3	PD belum mengumpulkan berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang pengelolaan BMD BPKPAD	Membuat surat kepada Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pembantu dengan Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD Kabupaten Temanggung serta Laporan Barang Pengguna	Kepala BPKPAD	Triwulan selama tahun 2024
4	PD belum memperbaharui data data kendaraan dinas dan pengusulan penghapusan kendaraan dinas	Membuat Surat Edaran kepada semua Perangkat Daerah tentang update data-data kendaraan dinas dan usulan penghapusan kendaraan dinas	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
5	terdapat perjanjian sewa menyewa aset pemda yang belum diperbarui	Membuat dan/atau memperbaharui Perjanjian Sewa Menyewa untuk aset Pemerintah Kabupaten Temanggung yang disewa oleh pihak lain	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Temanggung. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penetapan tujuan merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan penilaian risiko. Pada tahap ini akan ditetapkan tujuan dan sasaran pada tingkat operasional Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Temanggung yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Temanggung.

Tujuan	: Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi
Sasaran	: Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran BPKPAD Kab Temanggung, maka ditetapkan Indikator Program yaitu :

1. Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
2. Persentase dokumen penganggaran tepat waktu
3. Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu
4. Cakupan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah
5. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu
6. Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu
7. Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja
8. Persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah
9. Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu
10. Persentase realisasi penerimaan pajak daerah
11. Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu

Dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel III. 1
Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BPKPAD 2024

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN		SUB KEGIATAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Gaji dan tunjangan ASN
				2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	16	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				18	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
				19	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		6	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	20	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	21	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
				22 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		8	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	23 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
				24 Pengelolaan Dana darurat dan mendesak
				25 Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	26 Penyusunan Standar Harga
				27 Penatausahaan Barang Milik Daerah
				28 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	29 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
				30 Pengolahan, pemeliharaann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				31 Penagihan Pajak Daerah
				32 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Kegiatan Pengendalian yang diuraikan dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko operasional ini terbatas pada kegiatan pengendalian untuk menangani risiko–risiko operasional yang ditetapkan dalam Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan menetapkan konteks risiko sebagai berikut:

Tabel III. 2
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Temanggung (BPKPAD)		
Tahun Penilaian	: 2023		
Periode yang dinilai	: Periode Renja Tahun 2024		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Penunjang Keuangan		
OPD yang Dinilai	: BPKPAD		
Sumber Data	Renja BPKPAD tahun 2024		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.		
Program BPKPAD (renja 2024) dan Kegiatan Utama	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%
	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100%

Indikator Program	1	Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	91
	2	persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%
	3	persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100%
	4	Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	100%
	5	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu	100%
	6	Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100%
	7	persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80%
	8	persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8%
	9	persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%
	10	persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95%
	11	Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100%
Program, Kegiatan, dan Indikator Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Cakupan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	91
		persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%
		persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100%
		Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas daerah	100%
		Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu	100%
	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Penyampaian Laporan Daftar Barang Milik Daerah tepat waktu	100%
		persentase pemanfaatan aset di satuan kerja	80%
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
		persentase Peningkatan Potensi Target Pajak Daerah	8%
		persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu	100%
		persentase realisasi penerimaan pajak daerah	95%
		Penyampaian Laporan Pendapatan Daerah tepat waktu	100%

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko juga disampaikan atribut risiko antara lain: kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko pencapaian tujuan dan sasaran BPKPAD Kabupaten Temanggung, terdapat resiko-resiko untuk ditangani oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung yang digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel III. 3
Hasil Identifikasi Risiko Operasional

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
							Risiko terjadi pada Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	c/uc	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Perencanaan	Penyusunan Dokumen KUA, Perubahan KUA dan PPAS, perubahan PPAS tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	Bidang Penganggaran	1. Manajemen waktu tidak tepat 2. Kendala SIPD 3. Kecepatan input masing-masing OPD yang berbeda	1. Internal 2. Eksternal 3. Eksternal	1. C 2. UC 3. C	1. Penilaian kinerja yang buruk 2. Jika SIPD tidak dapat diakses/error maka data tidak dapat diinput 3. Detail rincian anggaran belum lengkap dan waktu ekstra yang untuk menyelesaikan data yang diinput ke SIPD	Pemkab Temanggung
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen										
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Perencanaan									

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
							Risiko terjadi pada Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	c/uc	Uraian	Pihak yang Terkena
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen									
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya pengelolaan kas daerah Kab temanggung	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1242 Dokumen	Pelaksanaan	Penerbitan SP2D Tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu	-	Bidang Perbendaharaan	Dokumen Pencairan masih sering terlambat disampaikan dan belum sepenuhnya memahami alur penerbitan SP2D	Perangkat Daerah	C	SP2D diterbitkan lebih dari 2 hari sejak SPM diterbitkan dan mengakibatkan pembayaran tertunda	Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
							Pelaksanaan	Penyampaian Laporan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu		Bidang Perbendaharaan	Pelaksanaan Kegiatan yang terlambat sehingga menghambat penyerapan Anggaran	Perangkat Daerah	C	Transfer Pusat ke Daerah menjadi tertunda	Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
							Risiko terjadi pada Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	c/uc	Uraian	Pihak yang Terkena
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan peratiran kepala daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta terlaksananya pembinaan akuntansi semua SKPD	100%	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Pertanggungjawaban	Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	- Penyusunan Laporan Keuangan kurang kompeten - kurang memperhatikan jadwal proses penyusunan Laporan Keuangan	Perangkat Daerah	C	- Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda menjadi terhambat - Penyampaian Laporan Keuangan Pemda kepada BPK terlambat	Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1236 orang	Pertanggungjawaban	Risiko kurangnya koordinasi antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	-	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tidak melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	C	-Laporan Keuangan Perangkat Daerah kurang memadai -Laporan Keuangan Pemda terhambat	Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
A.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan BMD. pemanfaatan barang milik daerah dan pensertifikatan barang milik daerah, serta tersusunnya standar harga	100%	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Dokumen	Perencanaan	Penyusunan Standar Harga tidak tepat waktu	-	Bidang Pengelolaa n BMD	Penyusunan Standar Harga kurang kompeten	Perangkat Daerah	C	Berpengaruh terhadap penyusunan RKA	SKPD dan Pemda

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
							Risiko terjadi pada Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	c/uc	Uraian	Pihak yang Terkena
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1236 Dokuemn	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	-	Bidang Pengelolaan BMD	Penyusunan Laporan BMD kurang kompeten	Perangkat Daerah	C	Penyusunan laporan BMD termasuk dalam komponen laporan keuangan sehingga jika penyusunan laporan BMD terlambat maka Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi juga terhambat	Pemkab Temanggung
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	410 Dokumen	Pelaksanaan	Aset Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal	-	Bidang Pengelolaan BMD	Karena kondisi lahan, serta penyewa keberatan dengan besaran sewa	Eksternal	C	Pemanfaatan BMD tidak Optimal	Pemkab Temanggung
A. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah	Terpeliharanya basis data pajak daerah, terpenuhinya perubahan data subjek/obyek pajak daerah serta terlaksananya penagihan pajak daerah	100 %	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Pelaksanaan	Subjek pajak dan Objek pajak belum terdata secara keseluruhan	-	Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	Sarana dan prasarana serta jumlah SDM terbatas	Eksternal	C	Potensi Pajak Daerah Kurang Optimal	Pemkab Temanggung
				Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	Pelaksanaan	Basis data tidak tersedia dengan lengkap	-	Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan	Sarana dan prasarana serta jumlah SDM terbatas	Eksternal	C	Pendapatan dari pajak daerah menjadi kurang optimal	Pemkab Temanggung
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Laporan	Pelaksanaan	Realisasi pajak daerah yang belum optimal	-	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Kesadaran Wajib Pajak Daerah yang masih rendah	Eksternal	UC	Pendapatan Pajak Daerah Menjadi kurang optimal dikarenakan kesadaran akan membayar pajak kurang	Pemkab Temanggung

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
							Risiko terjadi pada Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	c/uc	Uraian	Pihak yang Terkena
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Pertanggungjawaban	Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tepat waktu	-	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Pelaporan Pendapatan Retribusi dari OPD yang terlambat dikirim ke BPKPAD	Perangkat Daerah	C	Pengendalian pendapatan retribusi tidak optimal	Pemkab Temanggung

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Setelah risiko-risiko diidentifikasi, selanjutnya adalah memeringkat risiko dengan cara memberikan skor pada masing-masing risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian agar dapat dikelola secara efektif. Analisis risiko ini untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Berikut ini merupakan skala dalam mengukur kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di BPKPAD mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut seperti yang digambarkan pada table berikut ini :

Tabel III. 4
skala Pengukuran Kemungkinan Risiko

Skala	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Kemungkinan Kecil/Jarang
3	Kemungkinan Besar/ Sering
4	Hampir pasti Terjadi/ Sangat Sering

Tabel III. 5
Skala Pengukuran Dampak Risiko

Skala	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Rendah
3	Besar
4	Luar Biasa

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko dengan memberikan skor pada masing-masing risiko strategis yang telah teridentifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung :

Tabel III. 6
hasil analisis risiko pada BPKPAD

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
1	Penyusunan Dokumen KUA, Perubahan KUA dan PPAS, Perubahan PPAS tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ROO.23.37.29.01	4,00	3,00	12,00
2	Penyusunan Dokumen APBD dan Perubahan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ROO.23.37.29.02	4,00	2,00	8,00
3	Penerbitan SP2D Tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu	ROO.23.37.29.03	3,00	3,00	9,00
4	Penyampaian Laporan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu	ROO.23.37.29.04	4,00	3,00	12,00
5	Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu	ROO.23.37.29.05	4,00	3,00	12,00
6	Risiko kurangnya koordinasi antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	ROO.23.37.29.06	4,00	3,00	12,00
7	Penyusunan Standar Harga tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.07	4,00	3,00	12,00
8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.08	4,00	3,00	12,00
9	Aset Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal	ROO.23.37.29.09	4,00	3,00	12,00
10	Subjek pajak dan Objek pajak belum terdata secara keseluruhan	ROO.23.37.29.10	2,00	3,00	6,00
11	Basis data tidak tersedia dengan lengkap	ROO.23.37.29.11	2,00	3,00	6,00
12	Realisasi pajak daerah yang belum optimal	ROO.23.37.29.12	4,00	3,00	12,00
13	Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.13	4,00	3,00	12,00

Berdasarkan tabel diatas, daftar kemungkinan risiko yang teridentifikasi yang mendapatkan skor skala risiko lebih dari atau sama dengan 12 diperlukan pengendalian yang sangat baik. Setelah mengetahui skala risiko tersebut dari hasil kombinasi skala dampak dan skala kemungkinan kemudian menganalisis risiko dan diperoleh informasi terkait risiko prioritas sebagai berikut :

Tabel III. 7
Hasil dari Analisis risiko Prioritas

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Penyusunan Dokumen KUA, Perubahan KUA dan PPAS, Perubahan PPAS tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ROO.23.37.29.01	12,00	Bidang Pengan ggaran	1. Manajemen waktu tidak tepat 2. Kendala SIPD 3. Kecepatan input masing-masing OPD yang berbeda	1. Penilaian kinerja yang buruk 2. Jika SIPD tidak dapat diakses/error maka data tidak dapat diinput 3. Detail rincian anggaran belum lengkap dan waktu ekstra yang untuk menyelesaikan data yang diinput ke SIPD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
2	Penyampaian Laporan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu	ROO.23.37.29.04	12,00	Bidang Perbendaharaan	Pelaksanaan Kegiatan yang terlambat sehingga menghambat penyerapan Anggaran	Transfer Pusat ke Daerah menjadi tertunda
3	Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu	ROO.23.37.29.05	12,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	- Penyusun Laporan Keuangan kurang kompeten - kurang memperhatikan jadwal proses penyusunan Laporan Keuangan	- Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda menjadi terhambat - Penyampaian Laporan Keuangan Pemda kepada BPK terlambat
4	Risiko kurangnya koordinasi antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	ROO.23.37.29.06	12,00	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Tidak melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	- Laporan Keuangan Perangkat Daerah kurang memadai - Laporan Keuangan Pemda terhambat
5	Penyusunan Standar Harga tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.07	12,00	Bidang BMD	Penyusunan Standar Harga kurang kompeten	Berpengaruh terhadap penyusunan RKA
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.08	12,00	Bidang BMD	Penyusunan Laporan BMD kurang kompeten	Penyusunan laporan BMD termasuk dalam komponen laporan keuangan sehingga jika penyusunan laporan BMD terlambat maka Penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi juga terhambat
7	Aset Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal	ROO.23.37.29.09	12,00	Bidang BMD	Karena kondisi lahan, serta penyewa keberatan dengan besaran sewa	Pemanfaatan BMD tidak Optimal
8	Realisasi pajak daerah yang belum optimal	ROO.23.37.29.12	12,00	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Kesadaran Wajib Pajak Daerah yang masih rendah	Pendapatan Pajak Daerah Menjadi kurang optimal dikarenakan kesadaran akan membayar pajak kurang
9	Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.13	12,00	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Pelaporan Pendapatan Retribusi dari OPD yang terlambat dikirim ke BPKPAD	Pengendalian pendapatan retribusi tidak optimal

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Dalam rangka mengetahui efektifitas pengendalian yang telah terbangun, dilakukan penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki BPKPAD dalam rangka mengelola risiko yang

diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

1. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
2. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian atas risiko strategis BPKPAD dilakukan untuk:

1. Mengidentifikasi kebijakan yang sudah ada untuk menangani risiko
2. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada dan kelemahan pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu menangani risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, pengendalian belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah (masih ada risiko lain yang timbul).
3. Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan, yang hasilnya dapat berupa sebuah kebijakan yang masih perlu dibangun oleh BPKPAD untuk menangani risiko operasional.

Adapun kegiatan pengendalian yang sudah dilakukan oleh BPKPAD atas risiko operasional yang dinilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 8
uraian pengendalian yang sudah ada di BPKPAD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
a	b	c	d	e
1	Penyusunan Dokumen KUA, Perubahan KUA dan PPAS, Perubahan PPAS tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ROO.23.37.29.01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan eksekutif dan legislatif, penetapan tanggal lebih awal 2. Koordinasi dengan CP Pusdatin Kemendagri 3. Pendampingan saat penginputan ke SIPD 	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
2	Penyampaian Laporan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu	ROO.23.37.29.04	Menerbitkan SE BUD tentang Percepatan Pencairan Dana Kegiatan TKDD	Kurangnya informasi Perangkat Daerah mengenai proses penyaluran Dana Transfer Ke Dana Desa (TKDD)
3	Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu	ROO.23.37.29.05	Menerbitkan Surat Edaran Akhir tahun terkait penyusunan Laporan Keuangan	Kurangnya perhatian dan pemahaman dari Perangkat Daerah atas proses penyusunan Laporan Keuangan
4	Risiko kurangnya koordinasi antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	ROO.23.37.29.06	Menerbitkan Surat Edaran Akhir tahun terkait penyusunan Laporan Keuangan	Kurangnya perhatian dan pemahaman dari Perangkat Daerah atas proses penyusunan Laporan Keuangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
5	Penyusunan Standar Harga tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.07	Menerbitkan surat ke OPD untuk mengusulkan Standar Harga dengan batas waktu penyampaian	Kurangnya perhatian OPD terhadap surat usulan
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.08	Menerbitkan surat edaran terkait penatausahaan BMD	kurangnya perhatian OPD terhadap surat edaran
7	Aset Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal	ROO.23.37.29.09	Koordinasi dengan Pihak Terkait (BPN dan Pihak Ketiga)	kurang nya pemaahaman masyarakat
8	Realisasi pajak daerah yang belum optimal	ROO.23.37.29.12	Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak	kurang kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak
9	Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.13	Membuat bit.ly untuk pelaporan retribusi	kurangnya perhatian OPD terhadap bit.ly yang dibagikan

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan masih dibutuhkan kegiatan pengendalian baru untuk dilakukan. Perencanaan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya dampak apabila risiko benar-benar terjadi. Langkah kerja dalam menyusun RTP sebagai berikut :

1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Meskipun dalam survei persepsi melalui kuesioner *control Enviroment Evaluation* (CEE) didapatkan hasil kondisi lingkungan pengendalian telah memadai, tetapi upaya untuk terus melakukan perbaikan masih dibutuhkan. Berikut ini merupakan RTP lingkungan pengendalian yang masih perlu dilakukan :

Tabel III. 9

RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1	Masih terdapat Pegawai yang belum disiplin waktu	Dievaluasi secara berkala dalam apel pagi dan rapat berkala	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
II Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Kurangnya kualitas SDM yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan Aset Daerah	Pengembangan kompetensi melalui pengusulan diklat pegawai/Workshop, Rekomendasi Tugas Belajar	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Terdapat beberapa besaran pada SSH yang disusun belum sesuai dengan Perpres 33 tahun 2020	Melakukan Peninjauan besaran satuan harga pada Draft Peraturan Bupati tentang SSH dan SBU, ASB, dan HSPK Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020	Kepala BPKPAD	Triwulan II dan Triwulan III tahun 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
III Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan				
1	Belum terdapat SOP terkait penghapusan piutang daerah dan pengawasan dan pemeriksaan pajak	Menyusun Perubahan Perbup tentang penghapusan piutang daerah dan menyusun SOP penghapusan piutang daerah serta SOP Kegiatan Pengawasan dan pemeriksaan Pajak	Kepala BPKPAD	Triwulan I tahun 2024
2	Pohon kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021	Kepala BPKPAD	Triwulan II tahun 2024
IV hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait				
1	Belum optimalnya tapping box	Melaksanakan Pemantauan terkait pemasangan tapping box pada Restoran, hotel dsb yang menjadi obyek Pajak Daerah	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
2	Belum Optimalnya Penagihan Tunggalan PBB	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi ke desa dan kelurahan	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
3	PD belum mengumpulkan berita acara rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang pengelolaan BMD BPKPAD	Membuat surat kepada Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pembantu dengan Bidang Pengelolaan BMD BPKPAD Kabupaten Temanggung serta Laporan Barang Pengguna	Kepala BPKPAD	Triwulanan selama tahun 2024
4	PD belum memperbaharui data data kendaraan dinas dan pengusulan penghapusan kendaraan dinas	Membuat Surat Edaran kepada semua Perangkat Daerah tentang update data-data kendaraan dinas dan usulan penghapusan kendaraan dinas	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024
5	terdapat perjanjian sewa menyewa aset pemda yang belum diperbaruhi	Membuat dan/atau memperbaharui Perjanjian Sewa Menyewa untuk aset Pemerintah Kabupaten Temanggung yang disewa oleh pihak lain	Kepala BPKPAD	Januari-Desember 2024

2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

Berikut ini merupakan rencana Tindak Pengendalian yang akan dilakukan untuk mencegah risiko-risiko strategis terjadi :

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
1	Penyusunan Dokumen KUA, Perubahan KUA dan PPAS, Perubahan PPAS tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	ROO.23.37.29.01	1. Manajemen waktu lebih awal dan kebijakan yang lebih presisi dalam penentuan prioritas 2. Koordinasi dengan CP Pusdatin Kemendagri 3. Sosialisasi dan pelatihan personil	Bidang Penganggaran	Triwulan I Dan II
2	Penyampaian Laporan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tidak Tepat Waktu dan Tepat Mutu	ROO.23.37.29.04	Menerbitkan SE BUD tentang Percepatan Pencairan Dana Kegiatan Transfer Ke Dana Desa (TKDD)	Bidang Perbendaharaan	Januari - Desember 2024
3	Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu	ROO.23.37.29.05	Pembinaan ke Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Desember 2023- Mei 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
4	Risiko kurangnya koordinasi antar <i>intern</i> Perangkat Daerah	ROO.23.37.29.06	Pembinaan ke Perangkat Daerah	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Desember 2023- Mei 2024
5	Penyusunan Standar Harga tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.07	Membagikan surat terkait usulan SSH lewat group WA Pimpinan	Bidang Pengelolaan BMD	Minggu kedua Juni dan Minggu Pertama Desember
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.08	Membagikan surat edaran ke group WA Pimpinan, desk penatausahaan BMD, identifikasi data	Bidang Pengelolaan BMD	Desember 2024
7	Aset Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal	ROO.23.37.29.09	Meningkatkan koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait	Bidang Pengelolaan BMD	September 2024
8	Realisasi pajak daerah yang belum optimal	ROO.23.37.29.12	Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Januari- Desember 2024
9	Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tepat waktu	ROO.23.37.29.13	melaksanakan bimtek untuk pengelola pendapatan	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Semester I 2024

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP operasional ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun seperti yang dijelaskan dalam table di bawah ini

Tabel IV. 1
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
a	b	c	d	e	f
1	Manajemen waktu lebih awal dan kebijakan yang lebih presisi dalam penentuan prioritas	Surat dinas, Grup WA	Bidang Penganggaran	Perangkat Daerah	Triwulan ke II, dan III Tahun 2024
2	Koordinasi dengan CP Pusdatin Kemendagri	Surat dinas, Grup WA	Bidang Penganggaran	Perangkat Daerah	Triwulan ke II, dan III Tahun 2024
3	Sosialisasi dan pelatihan personil	Surat dinas, Grup WA	Bidang Penganggaran	Perangkat Daerah	Triwulan ke II, dan III Tahun 2024
4	Menerbitkan SE BUD tentang Percepatan Pencairan Dana Kegiatan Transfer Ke Dana Desa (TKDD)	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Perbendaharaan	Perangkat Daerah	Setiap akhir Triwulan tahun 2024
5	Pembinaan ke Perangkat Daerah	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Perangkat Daerah	Setiap bulan selama tahun 2024

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
6	Pembinaan ke Perangkat Daerah	Melalui media komunikasi elektronik, Telepon dan surat dinas	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Perangkat Daerah	Setiap bulan selama tahun 2024
7	Membagikan surat terkait usulan SSH lewat group WA Pimpinan	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Pengelolaan BMD	Perangkat Daerah	Mei 2024
8	Membagikan surat edaran ke group WA Pimpinan, desk penatausahaan BMD, identifikasi data	Surat Edaran, Melalui chat Whatsapp, telepon	Bidang Pengelolaan BMD	Perangkat Daerah	Setiap akhir Triwulan tahun 2024
9	Meningkatkan koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait	Surat Edaran, Melalui chat Whatsapp, telepon	Bidang Pengelolaan BMD	Calon penyewa, Masyarakat	September 2024
10	Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak	Surat Dinas, Chat Whatsapp, tatap muka	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Masyarakat/Wajib pajak	Setiap bulan selama tahun 2024
11	melaksanakan bimtek untuk pengelola pendapatan	Surat, media cetak, dan media komunikasi elektronik	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan	Semester I tahun 2024

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian *Intern* pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian *Intern* yang terpasang telah berjalan efektif, mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat dibawahnya secara berjenjang. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian Pemantauan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan Berkelanjutan merupakan proses pemantauan yang menyatu dengan kegiatan operasional/sehari-hari Instansi Pemerintah. Oleh karena itu mekanisme pemantauan atas pengendalian tertuang dan menyatu dalam pedoman/kebijakan dan SOP yang dibuat atau diperbaiki tersebut diatas, sehingga tidak memerlukan Pedoman Pemantauan Berkelanjutan tersendiri. Pemantauan tersebut dapat dilaksanakan oleh atasan langsung, pimpinan instansi pemerintah maupun pegawai lain melalui mekanisme saling uji, supervisi pelaksanaan tugas/sidak, rekonsiliasi, evaluasi, reviu berjenjang dan sebagainya antara lain:

a. Pemantauan atas penegakan kode etik/aturan perilaku.

Dilakukan oleh Tim Penegak Kode Etik dan Aturan Perilaku, teman sejawat dan Masyarakat melalui sarana pengaduan atau secara langsung.

b. Pemantauan atas Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan dan Aturan Kepegawaian Lain.

Mekanisme pemantauan berkelanjutan atas standar kompetensi, *database* kepegawaian dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai melalui penetapan indikator kinerja.

c. Pemantauan atas pelaksanaan SOP dilaksanakan secara berjenjang mulai dari petugas verifikator/ penanggungjawab/atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme yang diatur dalam SOP.

Rincian pemantauan berkelanjutan atas kegiatan pengendalian *Intern* yang akan dilakukan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel V. 1

Pemantauan Kegiatan Pengendalian *Intern* yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
a	b	c	d	e
1	Manajemen waktu lebih awal dan kebijakan yang lebih presisi dalam penentuan prioritas	Surat dinas, Grup WA	Bidang Penganggaran	Triwulan ke II dan III dan saat pelaksanaan penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA dan PPAS

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
2	Koordinasi dengan CP Pusdatin Kemendagri	Surat dinas, Grup WA	Bidang Penganggaran	Triwulan ke II dan III dan saat pelaksanaan penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA dan PPAS
3	Sosialisasi dan pelatihan personil	Surat dinas, Grup WA	Bidang Penganggaran	Triwulan ke II dan III dan saat pelaksanaan penyusunan KUA PPAS, Perubahan KUA dan PPAS
4	Menerbitkan SE BUD tentang Percepatan Pencairan Dana Kegiatan Transfer Ke Dana Desa (TKDD)	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Perbendaharaan	Triwulan I, II, III, IV
5	Pembinaan ke Perangkat Daerah	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Triwulan IV
6	Pembinaan ke Perangkat Daerah	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Triwulan IV
7	Membagikan surat terkait usulan SSH lewat group WA Pimpinan	Melalui media komunikasi elektronik dan surat dinas	Bidang Pengelolaan BMD	Mei 2024
8	Membagikan surat edaran ke group WA Pimpinan, desk penatausahaan BMD, identifikasi data	Melalui chat Whatsapp, telepon	Bidang Pengelolaan BMD	Setiap Akhir Triwulan
9	Meningkatkan koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait	Melalui chat Whatsapp, desk dengan Perangkat Daerah	Bidang Pengelolaan BMD	Januari-Desember 2024
10	Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak	Melalui chat Whatsapp, desk dengan Perangkat Daerah	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Januari-Desember 2024
11	melaksanakan bimtek untuk pengelola pendapatan	Sosialisasi dan Chat Whatsapp	Bidang Penagihan dan Pengendalian	Januari-Desember 2025

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah atas efektifitas penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh :

a. Inspektorat Kabupaten Temanggung

Inspektorat melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada PD dengan tujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian *Intern* yang terpasang telah berjalan efektif. Uraian rinci tentang evaluasi yang akan dilaksanakan akan dibahas dalam RTP PD Inspektorat.

b. Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK pada saat pelaksanaan audit.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

a. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun *Internal*, setiap unit kerja PD melaksanakan tindak lanjutnya.

b. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Rencana Perbaikan dalam dokumen RTP ini baru memuat sebagian kecil rencana perbaikan pengendalian. Oleh Karena itu guna ketercapaian tujuan maka Satuan Tugas SPIP Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil pemantauan berkelanjutan dan terpisah serta diskusi manajemen (*Controll Self Aseessment*) melaksanakan perbaikan RTP.

BAB VI PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan rencana untuk memitigasi/mengedalikan risiko-risiko yang kemungkinan muncul dalam pencapaian tujuan dan sasaran terhadap program dan kegiatan BPKPAD Kab Temanggung selama penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Renja BPKPAD Tahun 2024 dan merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis yang tertuang dalam dokumen RTP Operasional ini, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa :

- a. berdasarkan penilaian lingkungan pengendalian melalui kuisioner *Control Enviroment Evaluation* (CEE) didapatkan hasil yang sudah “memadai” tetapi penilaian lingkungan pengendalian melalui Reviu Dokumen dan dari hasil diskusi *Internal*, terdapat beberapa elemen yang masih kurang memadai yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.
- b. Kemudian berdasarkan penilaian risiko-risiko operasional atas tujuan serta sasaran program dan kegiatan BPKPAD yang tertuang dalam Renja Tahun 2024, didapatkan 9 (sembilan) risiko operasional yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen KUA, Perubahan KUA dan PPAS, Perubahan PPAS tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 2. Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu
 3. Penyampaian Laporan Keuangan tidak tepat waktu dan tepat mutu
 4. Risiko kurangnya koordinasi antar *intern* Perangkat Daerah
 5. Penyusunan Standar Harga tidak tepat waktu
 6. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu
 7. Aset Pemda yang belum dimanfaatkan secara optimal
 8. Realisasi pajak daerah yang belum optimal
 9. Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tepat waktu

Dokumen RTP Operasional ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian *Intern* agar berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan/sasaran dan akan menjadi dokumen yang terus-menerus mengalami penyesuaian dengan perkembangan kondisi terkini untuk

penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan di BPKPAD Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan berkelanjutan akan dapat tercapai.

Temanggung,

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah,



TRI WINARNO, SE,MM

Pembina Tk. I

NIP. 197310201999031005

LAMPIRAN